



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Rembuk Integritas Nasional

Integritas Tak Ternilai

Implementasi Pembangunan Budaya Integritas Nasional - Dari
Komitmen Menjadi Kerja Nyata



2017



KERANGKA ACUAN KERJA
REMBUK INTEGRITAS NASIONAL (RIN) TAHUN 2017
“Implementasi Pembangunan Budaya Integritas Nasional –
Dari Komitmen Menjadi Kerja Nyata”

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penguatan pembangunan budaya integritas nasional, seluruh pilar penting bangsa terutama Kementerian/Lembaga/Organisasi Lainnya/Pemerintah Daerah (KLOP) harus berperan aktif dalam membangun sistem integritas nasional. Harus kita sadari bersama bahwa pemberantasan korupsi dapat berhasil jika setiap pilar penting bangsa tersebut memiliki akuntabilitas yang kuat dan menjalin kolaborasi yang intensif dalam mewujudkan upaya pembangunan integritas nasional.

Hal tersebut di atas sejalan dengan inisiatif strategis Kementerian Keuangan yang pertama yaitu Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan. Inisiatif strategis tersebut bertujuan mewujudkan perbaikan budaya organisasi Kementerian Keuangan guna mendorong reformasi birokrasi dan menjadikan Kementerian Keuangan sebagai *branding* penguatan integritas secara nasional. *Outcomes* yang diharapkan dari inisiatif ini adalah terwujudnya birokrasi yang efisien, meningkatnya budaya integritas, terwujudnya inspirasi program budaya Kementerian Keuangan untuk instansi pemerintah lainnya, meningkatnya Indeks Persepsi Kesehatan Organisasi, dan meningkatnya indeks persepsi publik atas kualitas pelayanan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui *roadmap* Pembangunan Budaya Integritas Nasional sedang melaksanakan penguatan Sistem Integritas Nasional (SIN) yang terbagi menjadi 3 tahapan:

1. Tahap 1: Pembangunan pondasi SIN.

Pada tahap pertama, Pembangunan Pondasi SIN dituangkan sebagai sasaran strategis “Terwujudnya Pelembagaan SIN” dalam rangka memperkuat 3 pilar pembangunan integritas yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Diharapkan pada tahap ini dapat dihasilkan konsep, pedoman, serta *tools* yang dibutuhkan untuk tahap berikutnya.

2. Tahap 2: Aksi SIN.

Pada tahap kedua, konsep dan pedoman serta *tools* yang telah disusun diharapkan menjadi rencana aksi nasional. Konsep SIN yang telah diformalisasi pada level nasional kemudian akan diimplementasikan secara masif di beberapa pilar SIN. KPK secara paralel melakukan penyempurnaan instrumen untuk dapat melakukan *assessment* dari hasil implementasinya.



3. Tahap 3: Optimalisasi SIN.

Fase ketiga merupakan fase dimana SIN sudah diterapkan dan dijadikan barometer seluruh pilar dan elemen yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada fase ini juga diharapkan instrumen *assessment* SIN telah menjadi alat *monitoring* atas efektivitas SIN di masing-masing pilar.

Tahap 1 telah dilaksanakan dengan diakhiri Rembuk Integritas Nasional Tahun 2015 di Semarang yang dihadiri oleh 40 KLOP dan menghasilkan kesepakatan berbagai panduan yang dibutuhkan untuk pembangunan budaya integritas nasional, yaitu:

1. Konsep Integritas Nasional.
2. Panduan Komite Integritas.
3. Panduan Pembentukan Tunas Integritas.
4. Panduan Pengendalian Strategis KKN.
5. Panduan *Indonesia Corporate University* (I-Corpu) dan *National Integrity Plan*.

Tahun 2016 merupakan awal tahap 2 yang menitikberatkan pada implementasi hasil *piloting* tahap sebelumnya. Hal-hal yang dilaksanakan antara lain: (1) diseminasi dan perluasan KLOP yang akan bergabung dalam pembangunan budaya integritas organisasi, sektor dan nasional; dan (2) menelaah regulasi, eksistensi, dan legitimasi dari seluruh upaya pembangunan budaya integritas, baik secara organisasi maupun nasional.

Semangat membangun budaya integritas dari para tunas integritas yang terus meningkat perlu diutilisasi untuk melakukan review hasil implementasi budaya integritas di tiap KLOP dan nasional serta merevitalisasi hasil kesepakatan Tahap 1.

Atas dasar itulah, Rembuk Integritas Nasional ke-2 dilakukan dalam rangka membuat kesepakatan yang belum ada dan kebutuhan penyalarsan dari setiap peran KLOP. Rembuk Integritas Nasional ke-2 berlangsung di Kota Pekanbaru dengan tuan rumah Pemerintah Provinsi Riau dan dihadiri perwakilan 80 KLOP. RIN 2016 ini juga merupakan rangkaian dari peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) yang jatuh setiap tanggal 9 Desember.

Pada RIN II ini dihasilkan beberapa kesepakatan dari 80 KLOP yang hadir untuk mulai mengimplementasikan beberapa hal yang dihasilkan di RIN sebelumnya, yaitu:

1. Menggunakan panduan yang sama dalam pembangunan budaya integritas nasional.
2. Menetapkan pemetaan dan pengelolaan risiko KKN di organisasi masing-masing.
3. Menjadi pionir dalam pembangunan budaya integritas di sektor masing-masing dengan melibatkan *stakeholders*.
4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya diklat/*corpu* masing-masing yang terintegrasi melalui I-Corpu dan Dewan Integritas Nasional.
5. Mendorong adanya integrasi regulasi terkait pembangunan integritas nasional.



Sebagai perwujudan pelaksanaan penguatan Sistem Integritas Nasional (SIN), Rembuk Integritas Nasional ke-3 tahun 2017 berkomitmen untuk mulai mengimplementasikan seluruh konsep terkait Pembangunan Integritas Nasional yang dihasilkan pada RIN sebelumnya.

B. TEMA

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, maka kegiatan ini mengambil tema: **“Rembuk Integritas Nasional (RIN) Tahun 2017: Implementasi Pembangunan Budaya Integritas Nasional - Dari Komitmen Menjadi Kerja Nyata”**.

C. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komitmen para pimpinan KLOP dalam pembangunan budaya integritas, terutama dalam hal:

1. Akselerasi terhadap tindak lanjut hasil Rembuk Integritas Nasional Tahun 2016 dan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II 2017.
2. Implementasi pembentukan:
 - a. Dewan atau Forum Integritas Nasional sebagai forum nasional Komite Integritas di setiap KLOP, dan
 - b. *Indonesia Corporate University* (I-Corpu) untuk mendukung implementasi Pembangunan Budaya Integritas Nasional.
3. Strategi Pengendalian Integritas, melalui:
 - a. Penyelarasan *Key Performance Indicator* (KPI) yang paling strategis dan tugas/fungsi antar elemen penting bangsa untuk percepatan pembangunan nasional.
 - b. Peningkatan kesadaran akan *proxy war* dalam pengendalian strategis Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pengawasan dan mitigasi risiko atas pengelolaan dana desa sebagai perwujudan dari nawa cita membangun Indonesia dari pinggiran melalui penguatan desa.

D. MATERI DAN PEMBICARA

Materi dan pembicara RIN 2017 direncanakan sebagai berikut:

1. Arahan dan Pembukaan Menteri Keuangan
Rembuk akan diawali dengan arahan dan pembukaan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai pentingnya kolaborasi dan sinergi antar KLOP dalam rangka penguatan pembangunan budaya integritas nasional.
2. *Keynote Speech # 1*
Keynote speech pertama akan disampaikan oleh **Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi** dengan materi tentang pembangunan budaya integritas nasional.



3. *Keynote Speech # 2*

Keynote speech kedua akan disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan materi terkait *knowledge sharing* pembangunan budaya integritas di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Diskusi Panel

a. Diskusi Panel I: “**Pengawasan dan Mitigasi Risiko Dana Desa**”.

1) Penyaji:

- Menteri Dalam Negeri.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kepala Desa Panggunharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kepala Desa Pongok, Klaten, Jawa Tengah

2) Moderator: Inspektur V, Inspektorat Jenderal Kemenkeu

b. Diskusi Panel II: “**Implementasi Pembentukan *Indonesia Corporate University (I-Corpu)***”

1) Penyaji:

- Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
- Senior General Manager Telkom Corporate University
- Fungsional Utama KPK

2) Moderator: Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

5. Sidang Komisi

- a. Komisi A : Akselerasi tindak lanjut hasil Rembuk Integritas Nasional Tahun 2016 dan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II 2017
- b. Komisi B : Implementasi *Indonesia Corporate University* dan Pembentukan Dewan atau Forum Integritas Nasional.
- c. Komisi C : Strategi pengendalian integritas melalui penyelarasan KPI dan tugas/fungsi elemen bangsa.
- d. Komisi D : Pembahasan Pengawasan dan Mitigasi Risiko Dana Desa

6. Visitasi ke Kampung Mataraman, Desa Panggunharjo, Kabupaten Bantul.

E. OUTPUT

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Hasil evaluasi dan akselerasi terhadap tindak lanjut hasil Rembuk Integritas Nasional Tahun 2016 dan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II 2017 melalui instrumen anggaran dan regulasi.
2. Pembentukan Dewan atau Forum Integritas Nasional dan operasionalisasi *Indonesia Corporate University (I-Corpu)*.



3. Pengendalian strategis integritas nasional melalui penyelarasan KPI yang strategis dan peningkatan kesadaran “*proxy war*”.
4. Rencana aksi mitigasi risiko dan pengawasan pengelolaan dana desa.

F. WAKTU DAN TEMPAT

Rembuk direncanakan akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa s.d. Kamis / 5 s.d. 7 Desember 2017

Waktu : Pukul 08.00 – 17.00 WIB

Tempat : Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta,
Jalan Laksda Adisucipto No.81, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. PENYELENGGARA

Penyelenggara Rembuk Integritas Nasional (RIN) Tahun 2017 adalah Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. PESERTA

Peserta pada kegiatan Rembuk Integritas Nasional (RIN) sebanyak +/- 600 peserta yang berasal dari 180 KLOP, terbagi dalam 3 kategori:

1. Peserta Aktif:

Yaitu pimpinan (Sekjen/Irjen/Inspektur/Gubernur/Bupati/Walikota) dan tunas integritas KLOP yang sudah tergabung secara rutin dalam proses pembangunan integritas nasional dan menunjukkan progres positif terkait implementasi integritas organisasi di KLOPnya masing-masing, minimal telah memenuhi 2 persyaratan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Telah mengadakan TOT/Workshop/Sistem/Komite Integritas.
- b. Telah bergabung dalam berbagai FGD dan Workshop untuk penyusunan dan pengembangan panduan integritas nasional.
- c. Telah bergabung dalam kolaborasi Tunas Integritas Nasional yang dibuktikan dengan pengisian *Integrity Dashboard* masing-masing.

2. Peserta Partisipasif

Yaitu pimpinan (Sekjen/Irjen/Inspektur/Gubernur/Bupati/Walikota) dan tunas integritas KLOP yang akan mendukung kegiatan Rembuk Integritas Nasional (belum memenuhi syarat peserta aktif) namun sangat tertarik dan memiliki kemauan yang kuat untuk bersama membangun integritas nasional dengan minimal telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- a. Berkomitmen untuk berkontribusi menyemarakkan kegiatan utama maupun pendukung dari RIN.
 - b. Telah menjadi mitra strategis penyelenggaraan peringatan HAKI.
 - c. KLOP yang akan dan telah tergabung dalam kolaborasi Tunas Integritas Nasional.
3. Peserta Perorangan
- Yaitu individu yang tidak mewakili KLOP namun memiliki kontribusi nyata bagi pembangunan integritas nasional, misalnya pakar, praktisi, dan akademisi.

I. ANGGARAN

Anggaran penyelenggaraan kegiatan Rembuk Integritas Nasional (RIN) Tahun 2017 dibebankan pada DIPA Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp1 milyar dan anggaran pendamping berasal dari DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebesar Rp530 juta. Biaya perjalanan dinas masing-masing KLOP yang diundang menjadi beban DIPA masing-masing instansi (Kementerian, Lembaga, Organisasi lainnya, Pemerintah Daerah).

J. JADWAL ACARA

Senin, 4 Desember 2017

14.00 – 21.00 Registrasi

Selasa, 5 Desember 2017

07.30 – 09.00 Registrasi Peserta

09.00 – 10.30 Laporan Pantia Penyelenggara

Pembukaan dan Arahan Menteri Keuangan

Keynote Speech Pimpinan KPK dan Gubernur DIY

10.30 – 10.45 *Coffee Break*

10.45 – 12.30 Diskusi Panel I: Pengawasan dan Mitigasi Dana Desa

12.30 – 13.30 Ishoma

13.30 – 15.15 Diskusi Panel II: Implementasi *Indonesia Corporate University*

15.15 – 15.30 *Coffee Break*

15.30 – 17.00 Evaluasi dan akselerasi terhadap tindak lanjut hasil Rembuk

Integritas Nasional (RIN) Tahun 2016 dan Kolaborasi Tunas

Integritas Nasional II 2017 melalui instrumen anggaran dan regulasi

Rabu, 6 Desember 2017

08.00 – 09.00 Pembentukan Komisi

09.00 – 10.00 Pembahasan Komisi

10.00 – 10.15 *Coffee Break*

10.15 – 12.00 Pembahasan Komisi



12.00 – 13.00 Ishoma
13.00 – 15.30 Pembahasan Komisi
15.30 – 16.00 *Coffee Break*
16.00 – 17.00 Pleno Pemaparan Hasil Sidang Komisi

Kamis, 7 Desember 2017

08.00 – 08.30 Persiapan Visitasi Pengelolaan Dana Desa
08.30 – 09.30 Perjalanan ke Kampung Mataraman Desa Panggunharjo
09.30 – 09.45 *Coffe Break*
09.45 – 11.00 Pemaparan dan Tanya Jawab Pengelolaan Dana Desa
11.00 – 12.00 Ishoma
12.00 – 13.00 Perjalanan
13.00 – 15.30 Pleno Perumusan Hasil Rembuk Integritas Nasional (RIN)
15.30 – 16.00 *Coffee Break*
16.00 – 17.00 Pembacaan Hasil Rembuk Integritas Nasional (RIN) dan Penutupan

K. INFORMASI DAN KETERANGAN

Kementerian Keuangan:

Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai
Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Gedung Djuanda II Lantai 11
Jalan Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat
Telepon: (021) 351 2235

Komisi Pemberantasan Korupsi:

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
Kedeputian Pencegahan KPK
Gedung Merah Putih
Jalan HR Rasuna Said Kav C-22, Kuningan,
Jakarta Selatan
Telepon: (021) 2557 8300